

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semenjak masuknya virus Covid-19 di Indonesia pada bulan Maret tahun 2020 mengakibatkan terjadinya perubahan di berbagai sektor kehidupan, salah satunya yaitu sektor ekonomi. Semakin tingginya penyebaran virus tersebut pada akhirnya membuat pemerintah untuk mengeluarkan berbagai kebijakan atau regulasi guna meminimalisir penyebaran Covid-19.

Pada 17 April 2020 secara resmi pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan regulasi tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merubah kebiasaan masyarakat serta membatasi kegiatan diberbagai bidang kehidupan seperti, liburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pada 11 Januari 2021 pemerintah kemudian mengeluarkan kebijakan terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan tersebut dikeluarkan setelah mulai menurunnya kasus positif Covid-19 di Indonesia, PPKM diberlakukan di tujuh provinsi Jawa-Bali (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali).

Pemberlakuan PSBB dan PPKM pada akhirnya memperburuk kondisi ekonomi masyarakat di Indonesia, angka kemiskinan semakin meningkat serta munculnya berbagai masalah sosial yang tidak dapat dihindari karena banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan akibat Pemutusan Hubungan Kerja

(PHK) serta para UMKM yang terpaksa harus gulung tikar. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk berusaha melakukan berbagai upaya guna meringankan beban masyarakat miskin yang terkena dampak pandemi Covid-19.

Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengelola program bantuan sosial (bansos) yang terdiri dari bansos reguler dan bansos khusus. Bansos reguler merupakan bansos yang dirancang untuk menangani kemiskinan dan menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, program bansos ini terus berjalan baik ada atau tidaknya pandemi Covid-19 di Indonesia. Contoh bansos reguler yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Kartu Sembako. Sedangkan bansos khusus merupakan bantuan sosial yang tidak permanen, melainkan diresmikan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) dikarenakan kondisi atau keadaan yang darurat seperti pandemi Covid-19, contohnya program Bantuan Sosial Tunai (BST).

Berkaitan dengan beberapa bansos yang ada tersebut, penulis akan berfokus pada program pemerintah BPNT. Menurut Pasal 1 Ayat 4 Permensos Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan salah satu bantuan sosial yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah yang kemudian diperuntukan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui uang elektronik yang selanjutnya dapat digunakan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan di e-warong.¹

¹Rahmat Hidayat. "Membaca Permensos 5 Tahun 2021 Vs Penyaluran BPNT 2022 Secara Tunai Melalui Pos" <https://www.poros.id/berita-utama/>. (Diakses pada tanggal 01 April 2022 pukul 20.00 WIB)

Menurut Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai Elektronik warung gotong royong merupakan akronim dari e-warung yang diartikan sebagai agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerja sama dengan Bank Penyalur dan ditentukan sebagai tempat penarikan/pembelian Bantuan Sosial oleh Penerima Bantuan Sosial bersama Bank Penyalur.² E-Warung merupakan program warung bahan kebutuhan pokok yang ditunjuk resmi pemerintah untuk melayani penerima bantuan sosial. E-warung bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang kurang mampu supaya lebih sejahtera, dengan adanya e-warung diharapkan akses keluarga miskin terhadap pelayanan keuangan inklusif akan meningkat. Saat ini terdapat 44 e-warung di daerah Jakarta Selatan dan di Kelurahan Cipete Utara sendiri terdapat 3 e-warung yaitu di jalan Fatmawati Raya, jalan Damai dan jalan Haji Jian.

Gambar 1.1

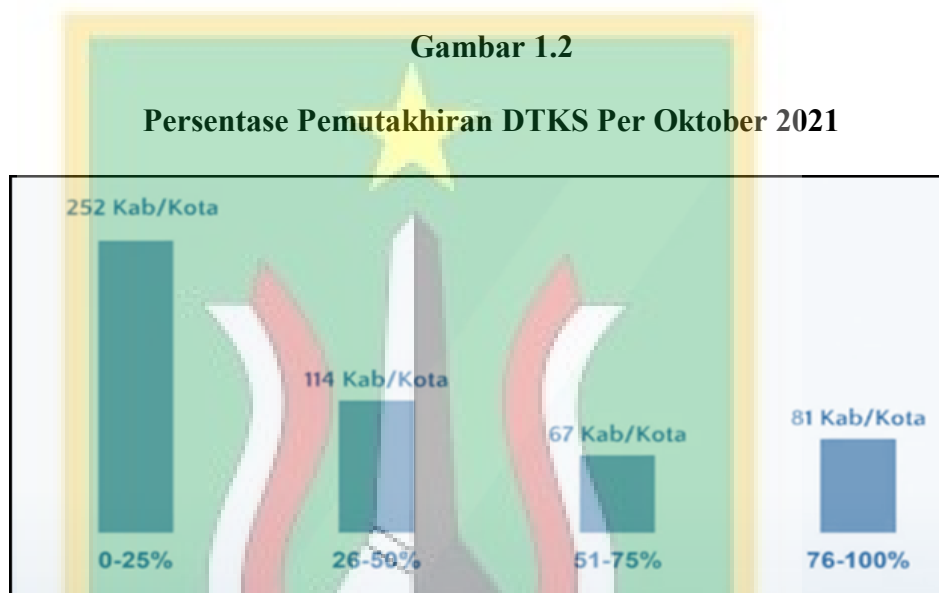
Data Penduduk Miskin Di DKI Jakarta

Jumlah & Persentase Penduduk Miskin di Jakarta Selatan						
Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
Kep Seribu	2,93	3,63	3,86	12,09	14,87	15,06
Jakarta Selatan	61,77	78,09	81,5	2,73	3,43	3,56
Jakarta Timur	91,51	122,73	125,37	3,12	4,16	4,28
Jakarta Pusat	34,13	41,92	45,1	3,68	4,51	4,94
Jakarta Barat	84,06	110,9	113,37	3,25	4,25	4,31
Jakarta Utara	91,15	123,59	132,73	5,04	6,78	7,24
DKI Jakarta	365,55	480,86	501,92	3,47	4,53	4,72

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Selatan

² Website : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/73010/perpres-no-63-tahun-2017> (Diakses pada tanggal 01 April 2022 pukul 22.00 WIB)

Berdasarkan data yang disajikan tersebut dapat diketahui bahwa sampai akhir tahun 2021 jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta semakin meningkat. Maka perlu adanya pengelolaan BPNT yang tepat agar bantuan dapat disalurkan secara merata.³ Provinsi DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.799.332 warga yang terdaftar ke dalam DTKS.



Sumber: Pusdatin Kemensos

Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa hanya sepertiga Kabupaten/Kota di Indonesia yang melakukan pemutakhiran data 2015 dengan cakupan rumah tangga di atas 50% per Oktober 2021. Selain itu dari hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak tanggal 17 sampai dengan 19 Desember 2021 diketahui bahwa masih ada Kartu Keluarga

³ <https://jakarta.bps.go.id> (Diakses pada tanggal 30 Juni 2022 pukul 20.00 WIB)

Sejahtera (KKS) yang belum di distribusikan dan KPM yang belum menggunakan kartu bansosnya pada program sembako periode bulan Juli – Oktober 2021.⁴

Berdasarkan observasi awal penulis yang bersumber dari masyarakat miskin di Kelurahan Cipete Utara bahwa permasalahan terkait ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran BPNT masih terjadi sampai akhir tahun 2021. Hal tersebut karena penyaluran bantuan mengacu pada KPM yang terdaftar di DTKS, sedangkan data yang terdaftar di DTKS tidak mutakhir. Sampai akhir tahun 2021 masih banyak Kabupaten/Kota di Indonesia yang belum memutakhirkan data pada DTKS sehingga banyak masyarakat miskin yang seharusnya berhak menerima BPNT tetapi belum menerima bantuan tersebut atau bahkan belum mengetahui adanya program BPNT dari pemerintah karena sosialisasi yang kurang dari aparat pemerintah kepada masyarakat.

Tabel 1.3

Jumlah Penduduk Miskin Di Kecamatan Kebayoran Baru Tahun 2022

No	Nama Kelurahan	Jumlah Kemiskinan
1	Kelurahan Cipete Utara	21.299
2	Kelurahan Gandaria Utara	23.448
3	Kelurahan Gunung	4.327
4	Kelurahan Kramat Pela	7.354
5	Kelurahan Melawai	172
6	Kelurahan Petogogan	7.012

⁴ Diakses melalui : <https://dinsos.jakarta.go.id/berita/post/benahi-data-penerima-bansos-pkh-dan-bpnt-dinsos-dki-kemensos-ri-lakukan-monev>, pada tanggal 28 Maret 2022.

7	Kelurahan Pulo	1.408
8	Kelurahan Rawa Barat	2.232
9	Kelurahan Selog	464
10	Kelurahan Kenanyan	708

Sumber: Pusdatin Kecamatan Kebayoran Baru

Berdasarkan DTKS per tahun 2022 terdapat 21.299 warga miskin di wilayah Kelurahan Cipete Utara, namun penerima BPNT yang sudah terealisasi hanya 152 warga, terdapat beberapa faktor dari ketidaksenadaan pemutakhiran data dalam implementasi pelaksanaan program BPNT. Kelurahan Cipete Utara dengan jumlah penduduk 31.334 jiwa, sedangkan jumlah warga miskin sebanyak 21.299 jiwa, adapun jumlah per Kartu Keluarga (KK) sebanyak 13.897 berdasarkan temuan dilapangan Kelurahan Cipete Utara banyak masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) semenjak pandemi Covid-19 karena masyarakat Kelurahan Cipete Utara mayoritas sebagai pekerja atau karyawan.

Adapun pemberian Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi Covid-19 menjadi solusi dari pemerintah untuk meringankan beban mereka. Namun, pada saat proses distribusi bantuan dilapangan terdapat banyak keluhan dari masyarakat. Pada dasarnya masyarakat ingin memilih sendiri bantuan sembako yang diberikan dari Kementerian Sosial. Namun kenyataanya, masyarakat tidak bisa memilih bahan pangan yang mereka perlukan karena terbentur dengan aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah. Dimana nominal yang diberikan sebesar Rp. 200.000

per bulan dan bahan pokok yang dapat dibeli pun sudah ditentukan. Selain itu adanya keluhan di masyarakat terkait perbedaan harga di e-warong yang lebih mahal serta ketersediaan-warong yang belum banyak jumlahnya.

Melihat berbagai permasalahan yang masih timbul dari program BPNT tersebut maka pemerintah diharapkan dapat lebih responsif dan proaktif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Selain itu pemerintah juga harus menyiapkan beberapa skenario solusi untuk menangani kendala yang dihadapi oleh masyarakat di lapangan. Saat ini kemudahan penyebaran informasi dan perkembangan era digital mengakibatkan banyak berkembangnya informasi yang tidak akurat di masyarakat, entah itu melalui media sosial atau bahkan non pemerintah. Laporan pada bidang bantuan sosial juga mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga membutuhkan perhatian yang lebih serius dari pemerintah, karena beberapa permasalahan terkait informasi dan pendataan penerima bantuan sosial maupun implementasinya dapat memunculkan konflik horizontal di masyarakat.

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian "**Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Pada Masa Pandemi Covid-19 Kepada Masyarakat Miskin Di Kelurahan Cipete Utara**".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan judul tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah pada bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat miskin di Kelurahan Cipete Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada masa pandemi Covid-19 kepada masyarakat miskin di Kelurahan Cipete Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu kajian ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan ilmu administrasi negara. Dapat digunakan sebagai bahan informasi dan referensi bagi para peneliti-peneliti yang tertarik dengan objek yang sama.

2) Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Serta Dapat menambah pengetahuan, wawasan serta mengembangkan kemampuan

dalam menulis karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan ilmu yang telah dipelajari selama masa pendidikan di perguruan tinggi.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini pembahasan dan penganalisaan masalah diklasifikasikan secara sistematis ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis mengemukakan berbagai macam referensi atau kajian pustaka yang mendukung untuk penelitian ini.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta lokasi dan jadwal penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB IV: PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis melakukan kajian terhadap materi yang penulis angkat pada tempat penelitian sesuai dengan judul yang telah disajikan sebelumnya.

BAB V: PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, serta saran untuk pihak yang berkaitan dengan penelitian yang dipilih oleh penulis.